



PENGADILAN AGAMA TALU

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
(TLHP)**

RUTIN/REGULER TIM PTA PADANG

TANGGAL 18 MEI 2022

**Jalan Jati II Simpang Empat Telp.(0753) 7464094 Fax (0753) 7464022
Website : www.pa-talu.net Email: pa_talu@yahoo.co.id
Pasaman Barat – Sumatera Barat. 26366**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada kita semua. Penyusunan Tindak lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai perwujudan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok pada Pengadilan Agama Talu baik dari perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pengawasan telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala dan hambatan dalam implementasinya.

Pada prinsipnya Laporan hasil tindak lanjut ini manifestasi dari pengawasan yang telah dilakukan oleh TIM Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 18 Mei 2022. Laporan ini bertujuan memastikan apakah temuan dari TIM pengawas Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah ditindak lanjuti agar tidak terjadi penumpukan temuan yang justru akan menghambat jalannya roda organisasi pada Pengadilan Agama Talu



Simpang Empat, 2 Juni 2022

Ketua

Syafrul, SHI, . M.SY

NIP. 198205172007041001



PENGADILAN AGAMA TALU

RAPAT TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN RUTIN/REGULER TIM PTA PADANG MARET TAHUN 2022

A. MANAJEMEN PERADILAN

No	Kondisi	Kreteria	TINDAK LANJUT	waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian
1.	Program kerja tahun 2022 PA Talu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, belum dibuat	Program kerja yang seharusnya disusun oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, pejabat fungsional dan pejabat structural	Sudah disusun	1 Minggu	Ketua	27 Mei 2022

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Perkara Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Talu (Perkara banding No.13/Pdt.G/2021/PTA Pdg), Nomor 45/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 6/Pdt.G/2021/PTA Pdg, Nomor 598/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 21/Pdt.G/2022/PTA Pdg)

a	Petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 36 menjelaskan bahwa Bundel B adalah himpunan surat-surat perkara yang diajukaj permohonan banding yang terdiri dari:a). Salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.b). Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila ada).c). Akta	Pimpinan Pengadilan Agama Talu memberikan pembinaan kepada pejabat/petugas terkait, supaya pemberkasan perkara sesuai pedoman yang ada yaitu Buku II.	sudah disusun sesuai buku II	1 Minggu	Panitera	27 Mei 2022
---	--	---	------------------------------	----------	----------	-------------

	permohonan banding.d). dan seterusnya					
2. Realisasi Anggaran DIPA 04						
a	Realisasi Anggaran DIPA 04 khususnya perkara prodeo masih sedikit sedangkan saat ini bulan mei sudah masuk triwulan II	Seharusnya pada triwulan II ini penyerapan anggaran sudah mencapai 45 %	sudah diusahakan realisasi sesuai aturan	5 bulan	Panitera/Se kretaris	Bulan Oktober
3. Jasa Posbakhum						
a.	Tidak ada struktur organisasi dari pihak penyedia jasa posbakhum	seharus pihak penyedia harus membuat bagan struktur organisasi agar dapat dilihat oleh pihak pencari keadilan	struktur organisasi akan dibuat oleh penyedia Posbakum	1 Minggu	Sekretaris	27 Mei 2022
4. Arsip perkara						
a.	Arsip perkara tidak dikelola secara profesional	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip	Arsip perkara sudah dikelola dengan baik	1 Minggu	Panmud Hukum	27 Mei 2022

C. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

No	Kondisi	Kreteria	TINDAK LANJUT	waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian
1	Berkas perkara nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU, Jenis Perkara: Dispensasi Kawin.Ditemukan adanya dasar hukum Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang tidak tepat/tidak benar, yaitu menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang	Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin adalah dengan HAKIM TUNGGAL, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanggal 21 November 2019, Pasal 1 angka 11 PERMA tersebut	Sudah disesuaikan dengan PERMa No. 5 Tahun 2019	2 Minggu	Ketua Majlis	2 Juni 2022

	Nomor 48 Tahun 2009.Pasal tersebut adalah mengenai PMH dengan Hakim Majelis yang susunannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.					
2	Berkas Perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU: Dalam Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) memuat redaksi "Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu" padahal di adalah Hakim Tunggal, demikian juga Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti, memuat redaksi "Membantu Majelis Hakim" dan "Melaksanakan perintah Ketua Majelis", padahal perkara tersebut adalah perkara Dispensasi Kawin yang diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal.	Seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, jika perkara tersebut diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal, maka redaksinya adalah "Membantu Hakim" dan "melaksanakan perintah Hakim".	Sudah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya	1 Minggu	Ketua Majlis	27 Mei 2022
3	Beberapa berkas perkara yang dilihat, antara lain Nomor 197/Pdt.G/2021/PA TALU, Nomor 75/Pd.G/2022/PA TALU, Nomor 9 dan 11/Pdt.G/2022/PA TALU. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik	SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, C.b: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta	Sudah disesuaikan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018	1 Minggu	Ketua Majlis	27 Mei 2022

	sebagai pihak Penggugat atau Tergugat mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilan sebagai suami guna untuk mempertimangkan beban kewajiban kepada suami yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan/atau nafkah anak.	kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"				
4.	Berkas perkara Nomor 75 dan 43/Pdt.G/2022/PA TALU, dalam memeriksa bukti surat tidak memberi catatan bahwa foto kopy bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.../T..., akan tetapi BAS menyatakan bahwa Ketua Majelis telah melakukan itu, kenyataannya tidak	Seharusnya ada pernyataan bahwa : bukti fotokopi ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan tanggal..... diberi kode P... atau T... dan diparaf oleh Ketua Majelis.	Sudah diperbaiki	1 Minggu	Ketua Majelis	27 Mei 2022

D. Administrasi Umum

No	Kondisi	Kreteria	TINDAK LANJUT	waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian
1	SK Pengelola Keuangan belum dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing jabatan pengelola keuangannya 2. Belum tersedianya arsip sk terkait operator sakti	PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara2. PMK No.171/PMK.05/2021 tentang	Sudah sesuaikan dengan PMK No. 178/PMK.05/2018	1 Minggu	Kasubbag Kepegawai an	27 Mei 2022

		Pelaksanaan Sistem SAKTI				
2	Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)pada data keuangan perkara belum ada diinput	Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)Aturan :Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMAHarus diinput data pada keuangan perkara	Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima) sudah diisi pada awal bulan	Setiap awal bulan	Kasubbag PTIP	
3	Daftar Barang Ruangan belum diupdateData Kondisi Barang pada SIMAK BMN harus diupdate sesuai kondisinya	Penatausahaan / Pengelolaan BMN Aturan : PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ Daerah PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN PMK No.83/PMK.06/2016	Sudah dipelajari pada aplikasi SAKT, karena semua penatausahaan BMN migrasi ke aplikasi SAKTI	4 Bulan	Kasubbag Umum dan Keuangan	September 2022
4	Pada Spby belum ditanda tangani oleh PPK , Bendahara, dan pemegang uang muka 2. Pada kuitansi dari pihak ketiga belum tandatangani lunas bayar bendahara, PPK dan Penerima Hasil Pekerjaan3. Pada GU 1 terdapaat kuitansi senilai Rp. 7.091.000,- tanggal 3 -2- 2022 belum diberikan materai4.	Pelaksanaan Anggaran/Pembukuan Keuangan/Dokumentasi Pertanggungjawaban KeuanganAturan :PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan daerahPMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerjaPMK	Semua dokumen keuangan yang belum ada tanda tangan sudah dilengkapi	1 Bulan	Kasubbag Umum dan Keuangan	Akhir Juni 2022

	PADA kuitansi senilai Rp. 12.076.020 t tanggal 28 Januari 2022 belum ada materai, stempel dan ditandatangani toko 5. Pada kdokumen perjalanan dinas ditemukan belum lengkap dokumennya , seperti pada surat perintah perjalanan dinas , lembar dua perjalnan dinas belum ditandatangani Ketua Pengadilan dan PPK , kuitansi, belum ditanda tangani oleh bendahara, PPK dan Penerima6. Pada Kuitansi bantuan sewa rumah belum ditanda tangani oleh penerima7. Pada GU 2 pada Kuitansi Pemeliharaan belum lengkap ditandatangani penerima , 8. Pada kuitansi pemeliharaan gedung senilai Rp. 34.721.000,- belum dibuatkan kuitansi totalnya 9. Kuitansi Perjalanan dinas sidang kekeling belum dibuat 10. Penggunaan biaya prodeo pada awal tahun masih belum memenuhi kriteria surat dirjen badilag	No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022				
5	Laporan keuangan Tahunan belum dijilid	Pelaporan Keuangan DIPA Aturan : PMK No.104/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan	Laporan Akan dijilid	1 Minggu	Kasubbag Umum dan Keuangan	27 Mei 2022

		Laporan Keuangan. PMK No.215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.				
6	Masih ada pegawai berdasarkan titik koordinat presensi kehadiran diluar kantor	Pelaksanaan presensi Aturan: SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3 Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5	Semua Pegawai diwajibkan absensi pada lokasi kantor	Setiap hari	Kasubbag Kepegawai an	
8	Belum ada di website PA Talu 1. LRA tahun 20222. Laporan PNBPN tahun 20223. Laporan Aset tahun 2022	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	Semua LRA, PNBPN dan laporan Aset sudah dilengkapi pada Website	2 Minggu	Kasubbag PTIP	
9	Belum dilaksanakan pengadaan belanja modal	Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021	Sudah realisasi 100 %	1 Bulan	PPK	25 Juni 2022
10	Belum di update informasi SOP pada pembebasan biaya perkara	Apakah Website untuk seluruh content dan menunya tersedia dan update sesuai dengan pedoman Badilag Nomor 4060/DjA/HM.02.3/12/2020 dan KMA1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di	SOP pada pembebasan biaya perkara sudah di uapdate	1 Minggu	Panitera	27 Mei 2022

		Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022				
11	1. Perpustakaan belum memakai aplikasi SLIM 2. Belum tersedianya buku pengunjung pustaka dan buku peminjaman buku pustaka 3. Buku Perpustakaan belum tertata rapi 4. Ruang perpustakaan belum rapi dan berdebu	SK KMA Nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan	aplikasi SLIM sudah dipakai dan sudah ditunjuk petugasnya, pustaka akan ditata rapi	1 Bulan	Kasubbag Umum dan Keuangan	Juni 2022
12	Evaluasi PPNNP per 3 bulan belum dilaksanakan pada triwulan 1	SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Evaluasi PPNNP per 3 bulan sudah dilaksanakan	1 Kali 3 Bulan	Kasubbag Umum dan Keuangan	
13	Masih ada SOP yang belum diupdate terutama pada SOP Pembebasan biaya Perkara	Seluruh SOP telah direviu dan diupdate (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya) Persekma No 1 dan No 2 tahun 2012	Sudah dilakukan update SOP pembebasan biaya perkara	2 Minggu	Panitera	15 Juni 2022

E. Kinerja Pelayan Publik

No	Kondisi	Kreteria	TINDAK LANJUT	waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian
1	Belum dimuat dalam Papan Informasi tentang biaya mendapatkan salinan putusan/penetapan oleh Ketua PA Talu	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,	Sudah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011	2 Minggu	Panitera	5 Juni 2022

	selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	memberi kewenangan kepada atas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.				
2.	Belum ada penetapan informasi biaya perolehan salinan putusan/penetapan PA Talu oleh Ketua selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,	Sudah dibuat informasi biaya perolehan salinan putusan/penetapan dengan SK Ketua PA talu	2 Minggu	Panitera	5 Juni 2022
3	Aplisasi gugatan mandiri belum difungsikan oleh para pihak	Harusnya Aplikasi tersebut difungsikan atau diupayakan untuk dilaksanakan di Pengadilan	Aplisasi gugatan mandiri sudah difungsikan oleh para pihak	2 Minggu	Panitera	5 Juni 2022

Notulen



Nurmatias, S. Ag
NIP. 197403312006041005



Simpang Empat, 2 Juni 2022
Ketua Pengadilan Agama Talu



SYAFRUL, SHL., M. Sy
NIP. 19820517 200704 1001